

BAB IV

STRATEGI HRW DALAM UPAYA PENEGAKKAN HAM ATAS KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS* PRESIDEN RODRIGO DUTERTE

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dituduhkan pada kebijakan *war on drugs* presiden Rodrigo Duterte mengacu pada definisi dari kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Piagam Pengadilan Militer Internasional Pasal 6 (c). Seperti yang sudah dijelaskan pada bab III bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk didalamnya yaitu pembunuhan dan tindakan tidak manusiawi terhadap warga sipil. Dalam pelaksanaan kebijakan *war on drugs*, HRW menjelaskan Presiden Rodrigo Duterte tidak mengenal ampun dan menyatakan akan memerangi narkoba secara brutal. Kebijakan *war on drugs* dilaksanakan dengan cara membunuh pelaku dan terdakwa narkoba melalui aparat kepolisian. Namun, dalam pelaksanaannya pembunuhan tersebut tidak didasarkan pada proses hukum yang membuat kebijakan *war on drugs* dinilai melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran terhadap HAM.

Bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana upaya HRW sebagai NGO yang bergerak dalam bidang kemanusiaan menegakkan HAM pada suatu kebijakan negara yang dalam hal ini adalah kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte. Dalam hal ini, HRW menggunakan sarana jaringan advokasi internasional dimana suatu persoalan terjadi ketika; (1) hubungan antara kelompok domestik dan pemerintah diblokir atau terhambat yang mana hubungan tersebut tidak efektif untuk menyelesaikan konflik, (2) aktivis atau penguasa politik percaya bahwa jaringan akan melanjutkan misi dan kampanye mereka dan secara aktif mempromosikan jaringan, (3) konferensi dan bentuk kontak internasional lainnya

menciptakan arena untuk membentuk dan memperkuat jaringan (Keck & Sikkink, 2014).

A. Strategi *Information Politics* HRW

Strategi *information politics* merupakan strategi yang dilakukan dengan cara mengikat anggota jaringan untuk mencapai efektivitas jaringan. Strategi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menyediakan informasi bagi masyarakat serta mendramatisir fakta melalui pernyataan-pernyataan korban dan sebagainya sehingga menarik perhatian (Azizah, 2013).

HRW menggunakan upaya strategi *information politics* dengan menginformasikan adanya pelanggaran HAM dalam implementasi kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte di Filipina yang diinformasikan melalui:

1. Laporan HRW yang berjudul “*License to Kill*”: *Philippine Police Killings in Duterte’s “War on Drugs”*.

Pada bulan Oktober 2016 sampai Januari 2017, HRW menyelidiki 24 insiden pembunuhan para pengedar narkoba dan pengguna narkoba yang melibatkan 32 korban, yang terjadi di Metro Manila, wilayah Ibu Kota Filipina, dan provinsi-provinsi terdekat sejak Presiden Rodrigo Duterte mulai menjabat 30 Juni 2016. Hal tersebut merupakan persentase kecil dari lebih dari 7.080 pembunuhan menurut data statistik terakhir dari Polisi Nasional Filipina pada 1 Juli 2016 dan 31 Januari 2017.

Proses investigasi HRW yaitu dengan melakukan wawancara dengan sumber terkait. Sebelum melakukan investigasi, HRW melakukan tindakan pengamanan yang ekstensif untuk memastikan keamanan saksi dan sanak saudara korban dengan tidak menyertakan nama

saksi dan kerabat korban yang diwawancarai beserta informasi identitas lainnya. Lingkungan perkotaan yang miskin dimana sebagian besar pembunuhan terjadi memiliki kehadiran informan polisi yang tinggi yang diharapkan dapat menyampaikan informasi tentang penyelidikan HAM atas dugaan penyalahgunaan oleh polisi. HRW berbicara kepada saudara dan saksi di lokasi di mana mereka dapat diwawancarai dengan aman dan secara pribadi.

Wawancara dilakukan di Tagalog dengan menggunakan bahasa yang dominan di wilayah Manila melalui penggunaan juru bahasa. Selain mencari informasi dari saksi dan kerabat korban, HRW mencari informasi dari polisi setempat dan memperoleh versi kejadian dari polisi yang terdapat dalam catatan polisi sebagai laporan "spot" atau "incident". Informasi yang terkandung dalam laporan tersebut juga disertakan dalam laporan penelitian HRW dan memiliki perbedaan dengan informasi yang dikumpulkan dari saksi dan keluarga korban.

Dalam laporannya, Sejak peresmian Presiden Rodrigo Duterte pada tanggal 30 Juni 2016, dan kebijakannya untuk "*war on drugs*," perwira polisi nasional Filipina dan warga sipil yang tidak dikenal telah membunuh lebih dari 7.000 orang pelaku dan terdakwa narkoba. Kampanye anti-narkoba yang disebut "*Operation Double Barrel*" telah menargetkan para pengedar dan pengguna narkoba yang dicurigai untuk ditangkap namun dalam praktiknya telah menjadi kampanye eksekusi di luar hukum di daerah-daerah miskin di Manila dan daerah-daerah perkotaan lainnya. Dukungan tegas Presiden Rodrigo Duterte tentang kampanye tersebut yang melibatkan Presiden Rodrigo Duterte dan pejabat senior lainnya menimbulkan indikasi adanya kemungkinan menghasut kekerasan, pembunuhan, dan yang bertanggungjawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Polisi Filipina

memalsukan bukti untuk membenarkan pembunuhan di luar hukum pada kebijakan "*war on drugs*" yang menyebabkan lebih dari 7.000 kematian.

HRW menemukan fakta bahwa laporan polisi resmi dari insiden ini selalu menegaskan pembelaan diri untuk membenarkan pembunuhan polisi yang bertentangan dengan laporan saksi mata yang menggambarkan bahwa pembunuhan tersebut sebagai pembunuhan berdarah dingin terhadap tersangka narkoba yang tidak bersenjata dalam tahanan. Untuk memperkuat klaim mereka, polisi secara rutin menanam senjata, mengeluarkan amunisi, dan paket obat-obatan di samping mayat korban. Tidak ada yang diinvestigasi secara bermakna, apalagi dituntut atas pembunuhan tersebut. Sebelum menjadi presiden terpilih, Rodrigo Duterte adalah walikota Davao selama lebih dari dua dekade. Melalui *Davao Death Squad* telah membunuh ratusan pengguna narkoba, anak jalanan, dan penjahat kecil lainnya. Rodrigo Duterte menolak keterlibatannya dalam regu kematian, akan tetapi Rodrigo Duterte mendukung pembunuhan yang dilakukan sebagai cara efektif untuk memberantas kejahatan.

2. *Media Asia Times Holdings Limited*

Asia Times Holdings Limited merupakan media informasi yang diluncurkan pada tahun 1995 dan beroperasi di beberapa benua. Asia Times telah menjadi salah satu media yang paling kredibel dalam menginformasikan berita di berbagai wilayah di dunia. Asia Times menjadi sarana publikasi yang memimpin informasi di pasar Asia (Asia Times, 2018).

Berdasarkan kredibilitas dan jangkauan yang luas dalam penyebaran berita, HRW bekerjasama dengan *Asia Times* dalam memberikan informasi terkait kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte yaitu dalam laporan yang berjudul "*World Must Pressure*

Philippines on Drug War Accountability". Laporan tersebut bertujuan menjangkau dan mengajak masyarakat dunia untuk turut andil dalam memperhatikan persoalan HAM yang terjadi di Filipina. Dengan melalui media informasi diharapkan upaya untuk menegakkan HAM pada kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte dapat memperoleh hasil yang baik.

Dalam laporan ini menjelaskan bahwa kebijakan *war on drugs* yang dijalankan oleh aparat kepolisian Filipina terdapat tindakan di luar hukum. Namun, pihak kepolisian Filipina melalui Direktur Jenderal Filipina, Ronald dela Rosa berupaya merubah citra tindakan diluar hukum oleh Presiden Rodrigo Duterte dengan *vener lawfulness*.

Dela Rosa melakukan penolakan terhadap aktivis HAM yang ingin melakukan penyelidikan independen terkait keterlibatan aparat polisi pada pembunuhan diluar hukum. Terlebih, pada bulan Agustus, Presiden Rodrigo Duterte berjanji untuk memaafkan dan mempromosikan personil polisi yang terlibat dalam pembunuhan di luar hukum.

Presiden Rodrigo diketahui tidak peduli dengan respon dunia internasional dan seruan dari PBB untuk menghentikan pembunuhan di luar hukum. Pemerintahan Filipina di bawah Presiden Rodrig Duterte juga mengancam media Rappler.com dengan mencabut izin operasinya. Duterte dan pendukungnya juga menargetkan saluran berita ABS-CBN serta Philippine Daily Inquirer, keduanya dikenal karena investigasi mendalam mereka terhadap kebijakannya (Kine, 2018).

Investigasi HRW terhadap insiden tertentu menemukan bahwa polisi bertanggung jawab atas eksekusi di luar hukum yang menegaskan adanya pembunuhan yang disengaja oleh pasukan keamanan negara atau agen mereka terhadap seseorang di tahanan.

Dalam banyak kasus, dimulai dengan seorang individu yang menerima kunjungan atau telepon dari seorang pejabat dari Barangay setempat yang memberitahukan bahwa mereka menggunakan daftar obat terlarang yang dibuat oleh pejabat Barangay dan polisi. Kunjungan semacam itu sering kali terbukti tidak dijadikan peringatan sebagai metode untuk mengkonfirmasi identitas dan lokasi target.

Saudara-saudara, tetangga, dan saksi lainnya mengatakan kepada HRW bahwa para penyerang bersenjata biasanya bekerja dalam kelompok yang terdiri dari dua, empat, atau belasan. Mereka akan memakai pakaian sipil, sering berwarna hitam, dan wajahnya dilindungi oleh tutup kepala bergaya *balaclava* atau topeng lainnya, dan topi baseball atau helm. Mereka akan menggedor pintu dan masuk ke ruangan, tapi penyerang tidak mengidentifikasi diri mereka atau memberikan peringatan. Anggota keluarga melaporkan bahwa mereka mendengar adanya pemukulan dan orang yang mereka cintai mengemis untuk hidup mereka.

Proses penembakan terjadi segera ketika pintu tertutup atau di jalan dan bahkan orang-orang bersenjata membawa tersangka narkoba pergi di mana beberapa menit kemudian tembakan akan terdengar dan penduduk setempat akan menemukan mayatnya atau tubuh akan dibuang ke tempat lain nantinya. Korban yang ditemukan terkadang dengan tangan diikat atau kepala terbungkus plastik. Penduduk setempat mengatakan bahwa mereka melihat polisi berseragam di sekitar tempat kejadian untuk mengamankan perimeternya dan bahkan jika tidak terlihat sebelum penembakan, penyidik TKP akan tiba dalam hitungan menit.

HRW memeriksa laporan polisi di hampir semua kasus yang diselidiki. Dalam proses penyelidikan, HRW menemukan bahwa datanya sangat kontras dengan yang diberikan oleh keluarga yang diwawancarai, namun keduanya

mirip satu sama lain pada nama, tempat dan tanggal. Sementara itu, Kepolisian Nasional Filipina secara terbuka berusaha untuk membedakan antara tersangka yang terbunuh saat penangkapan polisi dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang sipil bersenjata. HRW tidak menemukan perbedaan dalam kasus-kasus yang diselidiki. Dalam beberapa kasus, polisi menolak tuduhan keterlibatan dan mengklasifikasikan pembunuhan tersebut sebagai mayat temuan atau kematian yang sedang diselidiki sebelum para tersangka ditahan di tahanan polisi. Dalam kasus tersebut, polisi menegaskan bahwa mayoritas pembunuhan dilakukan oleh orang-orang atau kelompok obat-obatan terlarang.

Penyerang tak dikenal yang melakukan pembunuhan sebenarnya adalah petugas polisi atau agen polisi, taktik serupa yang digunakan dalam kasus yang didokumentasikan oleh HRW menunjukkan perencanaan dan koordinasi oleh polisi dan dalam beberapa kasus direncanakan oleh pejabat sipil setempat. Penelitian HRW menunjukkan bahwa keterlibatan polisi dalam pembunuhan tersangka narkoba jauh melampaui kasus pembunuhan polisi yang diakui secara resmi dalam operasi "*buy-bust*". Kegagalan pemerintah untuk menangkap apalagi mengadili satu petugas polisi karena peran mereka dalam pembunuhan pada kebijakan *war on drugs* didorong oleh Presiden Rodrigo Duterte yang mengirimkan pesan bahwa mereka yang terlibat tidak perlu takut untuk diperhitungkan dan dakwaan atas pembunuhan di masa depan dapat dilakukan dengan impunitas.

Dugaan pembunuhan di luar hukum terhadap ribuan tersangka pengedar dan pengguna narkoba di Filipina perlu dilihat dalam konteks ancaman kematian dari Presiden Rodrigo Duterte terhadap mereka yang terlibat dengan obat-obatan terlarang. Presiden Rodrigo Duterte dan bawahan utamanya dapat bertanggung jawab atas pidana di Filipina atau di luar negeri. Tidak ada bukti sejauh ini yang menunjukkan bahwa Presiden Rodrigo Duterte merencanakan atau memerintahkan pembunuhan di luar hukum yang spesifik. Namun, pernyataan Presiden Rodrigo Duterte untuk

membunuh para pelaku narkoba secara berulang sebagai bagian dari kampanye anti-narkobanya bisa merupakan tindakan yang menghasut penegak hukum untuk melakukan kejahatan pembunuhan. Pernyataannya yang mendorong warga di kalangan masyarakat umum untuk melakukan kekerasan terhadap pengguna narkoba yang dicurigai bisa merupakan hasutan terhadap kekerasan. Selanjutnya, doktrin perintah atau tanggung jawab superior memberlakukan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat atas tindakan bawahan yang tidak sah, di mana atasan mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui tindakan tidak sah tersebut dan gagal mencegah atau menghukum tindakan tersebut.

Pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh pasukan polisi pada akhirnya di bawah komando Presiden Rodrigo Duterte telah berulang kali mendapat perhatian dari media, PBB, pemerintah asing, dan organisasi nonpemerintah domestik dan internasional, termasuk dalam hal ini adalah HRW. Adanya tanggapan Presiden Rodrigo terhadap publik terkait adanya respon dunia internasional terhadap kejkannya adalah bukti bahwa ada indikasi kebijakannya menuai kontra HAM. Respon publik yang terus berlanjut terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut membuat Presiden Rodrigo Duterte dan bawahannya menolak atau meremehkan jika adanya indikasi tindakan ilegal pada operasi polisi yang ditugaskan dan Presiden Rodrigo Duterte juga tidak memiliki niat untuk menyelidiki adanya tuduhan kejahatan pada kebijakannya tersebut.

Akhirnya, presiden, pejabat senior, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembunuhan di luar hukum dapat dianggap bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan pelanggaran serius yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Serangan mematikan yang banyak dan tampaknya terorganisir terhadap kelompok tersangka yang ditargetkan secara publik dapat menyebabkan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang didefinisikan

oleh Pengadilan Pidana Internasional, dimana Filipina merupakan sebuah partai.

HRW percaya bahwa negara-negara harus mendekriminalisasi kepemilikan obat untuk penggunaan pribadi. Presiden Rodrigo Duterte memiliki tanggung jawab hukum untuk secara terbuka mengarahkan Kepolisian Nasional Filipina untuk mengakhiri kampanye eksekusi di luar hukum terhadap para pengedar dan pengguna narkoba yang dicurigai. Biro Investigasi dan Ombudsman Nasional seharusnya tidak memihak untuk menyelidiki pembunuhan tersebut dan meminta penuntutan atas semua pihak yang bertanggung jawab. Kongres juga harus mendengarkan pendapat yang luas mengenai masalah ini dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah pembunuhan yang lebih lanjut (Bouckaert, 2017).

Strategi *information politics* HRW menunjukkan adanya tindakan diluar hukum terhadap para korban terbunuh pada kebijakan *war on drugs* melalui investigasi terhadap korban tersebut. HRW melakukan serangkaian investigasi melalui wawancara terhadap keluarga korban dan tetangga korban yang menjadi saksi atas realisasi dari kebijakan *war on drugs*. Berdasarkan investigasi HRW, pada kebijakan *war on drugs* mengindikasikan terjadi pelanggaran terhadap HAM yaitu adanya kesaksian yang berbeda antara aparat kepolisian dengan kerabat dan tetangga korban yang dijelaskan pada tabel pada lampiran dalam penulisan ini.

B. Strategi Accountability Politics HRW

Strategi *Accountability Politics* merupakan strategi yang berupaya untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lain untuk dapat mengubah pandangan mereka terhadap suatu persoalan. Aktivis jaringan mencoba membuat peluang untuk menuntut suatu pemerintahan melakukan pertanggungjawaban politik (Keck & Sikkink, 2014). Upaya ini dilakukan dengan menuntut pertanggungjawaban politik terhadap Presiden

Rodrigo Duterte atas kebijakan *war on drugs* terhadap laporan adanya eksekusi diluar hukum pada kebijakannya.

Dalam upayanya menegakkan HAM di Filipina pada kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte, HRW melakukan strategi *accountability politics* sebagai bentuk pertanggungjawaban Filipina dalam menghormati HAM. Strategi ini dilakukan oleh HRW dikarenakan dalam persoalan ini berkaitan dengan kedaulatan negara dan prinsip pemimpin negara. Presiden Rodrigo Duterte diketahui tidak memperdulikan konteks internasional dalam menjalankan kebijakannya. Dengan mengungkit adanya perjanjian internasional terkait HAM yang telah Filipina ratisikasi diharapkan dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Presiden Rodrigo Duterte. Berdasarkan investigasi HRW, Presiden Rodrigo Duterte mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dalam pengimplimentasian kebijakannya.

Berikut upaya *Accountability Politics* HRW dalam menegakkan HAM pada kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte:

1. Upaya Pendekatan di Dalam Negeri Filipina
 - a. Presiden Rodrigo Duterte

Pada tanggal 3 Agustus 2016, HRW mengirimkan surat terkait persoalan HAM di Filipina. Sebagai upaya menindaklanjuti kebijakan *war on drugs* yang sudah dijalankan, HRW merasa perlu untuk mengingatkan Presiden Rodrigo Duterte akan kepeduliannya terhadap HAM dan menjalankan kebijakannya sesuai dengan hukum yang berlaku (Adams, 2016). Dalam suratnya, HRW menuntut Presiden Rodrigo Duterte untuk menghormati HAM dengan menjelaskan dampak dari kebijakannya bagi arga negara Filipina dan memberikan rekomendasi yang berpengaruh penting bagi HAM di Filipina. HRW menekankan kepada

Presiden Rodrigo Duterte sebagai kepala negara untuk bertindak berdasarkan hukum dan menjalankan kewajibannya untuk melindungi HAM. Surat HRW terhadap Presiden Rodrigo Duterte akan dilampirkan pada bagian akhir penulisan ini.

b. Kepolisian Nasional Filipina

Upaya akuntabilitas yang dilakukan HRW terhadap Kepolisian Nasional Filipina mengalami penolakan. Pasalnya, Direktur umum Kepolisian Nasional Filipina (PNP), Ronald dela Rosa, menolak untuk melakukan penyelidikan diluar hukum pada kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte dan menyatakan bahwa tuntutan tersebut sebagai “pelecehan hukum” dan meredam semangat petugas polisi Filipina dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Alan Cayetano berusaha untuk mencegah tuntutan pertanggungjawaban terkait kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte dengan menyebarkan kebohongan akan menghentikan kampanye anti narkoba dan menghormati hak (Kine, 2018).

2. Upaya HRW dalam Mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

HRW bekerjasama dengan PBB dalam menginformasikan isu-isu yang dibahas dalam PBB yang kemudian diinformasikan kepada pejabat PBB dan negara-negara anggota. HRW mempengaruhi kebijakan mengenai berbagai perosalan terkait HAM dan mendorong tindakan untuk mengatasi krisis HAM (Reuters, 2015). Selain itu, Sejak berdirinya Dewan Hak Asasi

Manusia pada tahun 2006, HRW terlibat dalam memperkuat kapasitasnya untuk mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh dunia dan lebih responsif terhadap kebutuhan korban pelanggaran HAM. HRW bekerja untuk memantau kegiatan Dewan, meminta pertanggungjawaban para anggotanya atas tindakan mereka dan memajukan kepatuhan dengan tujuannya untuk menangani situasi pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran berat dan sistematis di seluruh dunia (Balibouse, 2014).

Pada tanggal 11-29 September 2017, HRW turut andil dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Dibawah atas nama 40 negara yang bergabung, dalam *joint statement* artikel 10 menyatakan bahwa Filipina sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia untuk bekerjasama melindungi dan mempromosikan HAM secara penuh. Sidang ini juga mendorong pemerintah Filipina untuk bekerja dengan warga negara dan PBB untuk mempromosikan dan melindungi HAM, termasuk ketersediannya dalam menjauhi tindakan diluar hukum dan kesewenang-wenangan tanpa syarat dan batasan. Hasil dari sidang tersebut terlampir pada lampiran dalam penulisan ini.

HRW mendesak negara-negara anggota PBB untuk mengatasi perang berdarah Presiden Rodrigo Duterte melawan narkoba. Selain itu, HRW juga mendesak PBB untuk dapat mendesak Filipina agar mendukung penyelidikan internasional terkait pembunuhan yang terjadi. Pernyataan HRW tersebut muncul menjelang penampilan Filipina untuk siklus ketiga dari *Universal Periodic Review* (UPR) Dewan Hak Asasi Manusia pada 8 Mei di Jenewa. Diketahui kajian tahun ini akan mencakup 4 tahun terakhir

pemerintahan mantan Presiden Benigno Aquino III sampai saat ini. Melalui wakil HRW di Asia, Phelim Kine, HRW merasa tinjauan PBB terhadap Filipina sangat penting karena besarnya besarnya bencana HAM sejak Presiden Duterte berkuasa tahun lalu (Merez, 2017).

3. Upaya HRW dalam Mendesak *Tom Lantos Human Rights Commission*

Tom Lantos Human Rights Commission merupakan komisi yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada tahun 2008. Komisi tersebut diberi nama Tom Lantos sebagai bentuk penghormatan terhadap anggota kongres AS, Thomas Peter Lantos, atas dedikasinya mendirikan *Congressional Human Rights Caucus* (CHRC). CHRC didirikan untuk membela hak-hak manusia yang kemudian disusun dalam *United Nations Universal Declaration of Human Rights*. Komisi ini berada di *House Committee on Foreign Affairs*, Amerika Serikat.

Komisi ini dituntut untuk mempromosikan, membela dan mengadvokasi HAM internasional yang sebagaimana tercantum dalam *United Nations Universal Declaration of Human Rights* dan instrumen HAM lainnya yang relevan. Komisi melakukan kegiatan pendidikan publik, memberikan nasihat ahli hak asasi manusia dan mendorong anggota Kongres untuk secara aktif terlibat dalam masalah HAM. Dalam melaksanakan mandatnya, Komisi bekerja sama dengan staf kongres, Senat Amerika Serikat (AS), dan cabang eksekutif, dan terus-menerus bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil nasional dan internasional.

HRW memberikan pernyataan terkait bagaimana kebijakan *war on drugs* dijalankan kepada dengan tidak berlandaskan hukum dan tidak memperhatikan HAM kepada *Tom Lantos Human Rights Commission*. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Desember, Kedutaan Besar AS di Manila mengumumkan bahwa *Millennium Challenge Corporation* (MCC) akan menunda keputusan pendanaan baru untuk Pemerintah Filipina karena keprihatinannya terhadap hukum dan kebebasan warga sipil di Filipina. HRW juga mendorong Kongres untuk berperan aktif dalam mengawasi kebijakan *war on drugs* dijalankan. Kongres juga bisa terlibat secara langsung untuk menghentikan pertumpahan darah di Filipina. HRW mendesak Kongres untuk lebih jauh membatasi bantuan kepada pasukan keamanan Filipina agar Filipina mempertimbangkan tolok ukur HAM dalam kebijakannya (Human Rights Watch, 2017).

C. Pengaruh Strategi *Information Politics* dan *Accountability Politics* terhadap Dunia Internasional

Upaya HRW dalam menegakkan HAM pada kebijakan *war on drugs* melalui strategi *information politics* dan *accountability politics* menimbulkan berbagai respon dari dunia internasional yang mendukung perlindungan terhadap HAM. Pengaruh dari strategi tersebut adalah terdapat usaha dari dunia internasional untuk turut mendesak Presiden Rodrigo Duterte menghentikan pembunuhan di luar hukum dari pelaksanaan kebijakannya, diantaranya yaitu:

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pada bulan Juni 2016, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon mengumumkan bahwa dia merasa terganggu oleh pernyataan yang dibuat oleh presiden terpilih Filipina, Rodrigo Duterte, mengenai pembunuhan di luar proses hukum. Dalam sebuah pertemuan tahunan Asosiasi Koresponden PBB, Ban mengatakan bahwa secara tegas mengutuk dukungan nyata terhadap pembunuhan di luar hukum, yang ilegal dan merupakan pelanggaran hak dan kebebasan mendasar. Pada bulan Agustus, Yuro Fedotov, direktur eksekutif *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC), mengeluarkan penolakan kuat atas penggunaan pembunuhan di luar hukum untuk melawan narkoba, mendesak pemerintah Filipina untuk menghormati HAM.

UNODC menyatakan kesiapannya untuk terlibat lebih jauh dengan Filipina dan semua negara untuk membawa pedagang obat bius ke pengadilan dengan perlindungan hukum yang sesuai dengan standar dan norma internasional, dan mempromosikan pendekatan pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, dan reintegrasi yang berbasis pada bukti, sains, kesehatan masyarakat dan HAM. Pada bulan September 2016, Zeid Ra'ad Al Hussein, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, mengkritik Presiden Rodrigo Duterte dan kebijakan *war on drugs* dengan mengatakan “pernyataan mencemooh hukum HAM internasional menunjukkan kurangnya pemahaman tentang institusi HAM kita dan prinsip-prinsip yang membuat masyarakat tetap aman”.

2. *International Criminal Court (ICC)*

Pada bulan Oktober 2016, jaksa ICC mengkritik pejabat tinggi pemerintah Filipina yang menyatakan bahwa memaafkan tindakan pembunuhan pada kebijakan *war on drugs* dan menargetkan warga sipil dengan kekuatan yang mematikan. Jaksa ICC menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan pada akhirnya dapat jatuh di bawah yurisdiksi ICC karena setiap tindakan kekerasan massal baik memesan, meminta, memberi dorongan, atau memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kejahatan tersebut berpotensi diajukan ke pengadilan.

3. Parlemen Eropa dan Uni Eropa

Pada bulan September 2016, Parlemen Eropa mendesak pemerintah Filipina untuk mengakhiri gelombang eksekusi dan pembunuhan di luar proses hukum, meluncurkan penyelidikan terhadap mereka dan menerapkan kebijakan dan program komprehensif yang spesifik sesuai dengan penghormatan terhadap HAM baik dalam kancah nasional maupun internasional.

Dalam kritiknya terhadap kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte, Uni Eropa belum mengumumkan pembatasan kapasitas pelatihan dan pengembangan dan berkelanjutan untuk Kepolisian Nasional Filipina melalui program EPJUST I dan EPJUST II, yang berakhir tahun lalu dan telah diganti dengan GoJustt (*Governance in Justice*), sebuah program yang mendukung reformasi peradilan di Filipina. Pada bulan Oktober 2016, Duta Besar Uni Eropa untuk Filipina, Franz Jessen, mengumumkan bahwa Filipina akan membantu untuk mendanai

rehabilitasi para pecandu narkoba di Filipina. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Filipina sebagai masalah bersama, dan memiliki dimensi internasional dan nasional.

4. Amerika Serikat (AS)

Amerika Serikat (AS) adalah pendonor yang signifikan terhadap Filipina. Pada tahun 2017, AS mengirimkan bantuan sebesar 180 juta US \$ sebagai upaya bantuan terhadap keamanan Filipina, termasuk penyediaan senjata dan pelatihan bagi kepolisian. Pada tanggal 27 Juli 2016, Menteri Luar Negeri AS John Kerry menjanjikan 32 juta US \$ untuk pelatihan dan layanan kepada Kepolisian Nasional Filipina. Empat bulan kemudian, setelah bukti keterlibatan polisi dalam pelanggaran menjadi sangat banyak, Departemen Luar Negeri menghentikan penjualan 26.000 senapan serbu militer ke kepolisian Filipina karena mendapat tentangan dari Senator Benjamin Cardin, anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Cardin menentang kesepakatan tersebut karena kekhawatirannya mengenai pelanggaran HAM di Filipina.

Pada bulan Agustus, juru bicara Departemen Luar Negeri Anna Richey-Allen, menyuarakan keprihatinan atas laporan pembunuhan di luar hukum yang mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri AS sangat mendesak Filipina untuk memastikan upaya penegakan hukumnya sesuai dengan kewajiban HAM. Pada tanggal 29 September 2016, Senator AS Cardin dan Patrick Leahy sebagai penulis ketentuan undang-undang AS yang melarang Amerika Serikat untuk memberikan bantuan kepada unit keamanan asing yang melanggar

HAM tanpa hukuman, mengeluarkan pernyataan yang mengkritik pelanggaran HAM kampanye narkoba pada kebijakan *war on drugs*. Pernyataan Leahy menyimpulkan bahwa perang melawan narkoba oleh Presiden Rodrigo Duterte bukan kesalahan dalam penerapan kekuasaan, akan tetapi tindakan yang brutal, sistematis dan meluas serta di luar batas demokrasi konstitusional. Pada bulan Oktober 2016, departemen kepolisian San Francisco mengakhiri sebuah program pelatihan selama 16 tahun untuk Kepolisian Nasional Filipina yang dimulai pada tahun 2000 karena keprihatinan atas tuduhan pelanggaran hak-hak sipil dan HAM di Filipina.

Tak lama setelah pemilihan Donald Trump bulan November sebagai presiden AS, sidang konfirmasi Senat 11 Januari 2017 untuk Sekretaris Negara Rex Tillerson, Tillerson menolak untuk mengkritik perang obat terlarang Presiden Rodrigo Duterte dan sebaliknya mengindikasikan bahwa memastikan hubungan dekat dengan pemerintah Filipina akan menjadi prioritas utamanya. Tillerson mengatakan bahwa AS dan Filipina memiliki persahabatan yang telah berlangsung lama, dan penting bagi AS untuk menjaganya. Selain itu, Tillerson menegaskan Filipina tetap menjadi sekutu AS.

Pada tanggal 26 Januari, Sekretaris Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan melanjutkan peningkatan dan perluasan fasilitas pangkalan militer Filipina pada tahun 2017. Lorenzana mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari Perjanjian Kerjasama Pembukaan Pertahanan bilateral, sebuah kesepakatan pada tahun 2014 yang

dinegosiasikan di bawah mantan Presiden Benigno Aquino III (Bouckaert, 2017).

Upaya HRW menegakkan HAM di Filipina pada kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte memang belum mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan yaitu Presiden Roodrigo Duterte. Akan tetapi, upaya HRW dapat didukung oleh dunia internasional yang memiliki prinsip yang sama yaitu melindungi dan mempromosikan HAM di dunia. Dunia internasional dapat turut andil mendesak Presiden Rodrigo Duterte untuk menghargai, melindungi dan mempromosikan HAM sebagai kepala negara dan anggota dari perlindungan HAM di dunia dengan tidak melakukan tindakan di luar hukum dan kesewenang-wenangan terhadap HAM.